

**TATAKELOLA KAS PERGURUAN TINGGI SWASTA
BERBASIS SISTEM INFORMASI**

MONOGRAF



**Suryo Pratolo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Adityo Reyhan Putropratolo, Universitas Gadjah Mada**

**BAHAN AJAR TAMBAHAN
AKUNTANSI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2008-2009**

**LEMBAR PENGESAHAN
BAHAN AJAR NON ISBN**

1.	Judul	:	Tatakelola Kas Perguruan Tinggi Swasta Berbasis Sistem Informasi
2.	Penyusun	:	Dr. Suryo Pratolo, SE., M.Si, Ak., CA., AAP-A & Adityo Reyhan Putropratolo
3.	NIK	:	19750626200004 143 075
4.	Unit Kerja	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yogyakarta, 31 Mei 2019

Ketua Program Studi



(Dr. Ahim Abdurrahim, S.E., M.Si., Akt., SAS, CA.,)
NIP/NIK. 19701126199603 143 053

Daftar Isi

A. PENDAHULUAN	3
B. TATAKELOLA KAS	4
1. Definisi Tatakelola Kas.....	5
2. Tujuan Tatakelola Kas	5
3. Fungsi Tatakelola Kas.....	6
4. Faktor yang memengaruhi Tatakelola Kas	6
5. Unsur-unsur Tatakelola Kas.....	7
6. Pengukuran Tatakelola Kas.....	8
C. KARAKTERISTIK & RISIKO KAS	9
D. MENGENDALIKAN RISIKO KAS	16
E. PENGANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN PTS	20
F. SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS	21
1. Prinsip –Prinsip Penerimaan Kas	25
2. Pihak-pihak yang terkait.....	27
3. Prosedur Penerimaan Kas.....	29
4. Prosedur piutang Mahasiswa.....	30
F. SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS PTS	33
1. Prinsip-prinsip Pengeluaran Kas.....	36
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengeluaran kas	37
3. Metode Pencairan Kas.....	39
G. TATAKELOLA KAS DI UNIT KERJA	39
H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KAS UNIT KERJA	40
1. Pertanggungjawaban Keuangan.....	40
2. Pertanggungjawaban Kegiatan.....	43
I. PERPAJAKAN DI PTS.....	45
1. PPh Orang Pribadi	47
2. PPh Badan untuk PTS.....	53
J. TATAKELOLA KAS PTS DENGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI	54
Daftar Pustaka.....	55

TATAKELOLA KAS PERGURUAN TINGGI SWASTA BERBASIS SISTEM INFORMASI

MONOGRAF

**Suryo Pratolo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Adityo Reyhan Putropratolo, Universitas Gadjah Mada**

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan jantung kehidupan sebuah bangsa. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, mendeskripsikan secara jelas tentang pendidikan, bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu pendidikan tinggi merupakan sebuah rahim yang sangat urgen sebab dari sinilah lahir manusia-manusia yang memiliki kapasitas sumber daya manusia yang baik untuk membangun negara dan bangsa. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Pendidikan tinggi merupakan sebuah proyek peradaban masa depan suatu bangsa. Sebagian besar perkembangan masyarakat modern tergantung pada standar pendidikan tinggi, sehingga peran pendidikan tinggi adalah mempersiapkan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya untuk membangun diri dan bangsanya. Orang-orang yang telah ditempa dalam dunia pendidikan tinggi seharusnya memiliki karakter pembaharu, berbudaya intelektual serta memiliki ide dan gagasan baru dalam mencari solusi untuk menyikapi suatu permasalahan dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Pembiayaan pendidikan pada Pendidikan Tinggi dapat dibedakan atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Biaya Investasi satuan pendidikan yang dimaksud adalah biaya sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Biaya operasional meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa, daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, dan lain-lain. Sedangkan biaya personal yang dimaksudkan adalah

biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Peraturan perguruan tinggi nomor 04 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi, secara jelas mengisyaratkan batasan-batasan tanggung jawab, tugas dan wewenang menteri (perguruan tinggi) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Lebih lanjut berkaitan dengan pembinaan dan atau pendanaan untuk perguruan tinggi diatur secara terpisah baik untuk perguruan tinggi swasta maupun untuk perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Peraturan menteri riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 19 tentang program pembinaan perguruan tinggi swasta tahun 2015. Program pembinaan tersebut dibagi ke dalam wilayah koordinasi (kopertis) dan biaya/pendanaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara berdasarkan proposal yang diusulkan oleh perguruan tinggi swasta atau yayasan sebagai badan penyelenggara berbadan hukum. Sedangkan untuk Perguruan Tinggi Negeri, semua sumber dana berasal dari APBN. Hal ini diatur secara khusus dalam peraturan perguruan tinggi nomor 26 tahun 2015 tentang bnetuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi badan hukum.

Anggaran organisasi publik seperti perguruan tinggi pada umumnya adalah anggaran berbas kas, yang artinya bahwa anggaran tersebut menunjukkan rencana penerimaan pengeluaran kas, sehingga merupakan hal penting untuk melakukan tatakelola kas untuk menjamin ketersediaan kas untuk kebutuhan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam anggaran. Ketersediaan kas adalah sumber kehidupan organisasi. Dengan kas, dengan asumsi ada tatakelola yang tepat dan operasi yang ekonomis, efisien, dan efektif, PTS dapat tumbuh dan berkembang, dan sebaliknya tanpa kas tidak bisa menjalankan operasionalnya. Tidak adanya kas untuk operasional entitas berarti kematian. Tujuan dari monograf ini adalah untuk membantu pembaca memahami teknik mengelola kas untuk PTS, meliputi:

- Teknik tatekelola penerimaan kas baik dari mahasiswa maupun non mahasiswa secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- Teknik tatekelola pengeluaran kas dari bendahara umum universitas kepada bendahara unit kerja.
- Teknik tatakelola kas di unit kerja baik core unit aupun supporting unit.
- Teknik pertanggungjawaban penggunaan kas oleh unit kerja kepada universitas.

*****Dibuat Grafik**